

# Resepsi Kaum Tuli terhadap Berita Politik di Televisi

Tia Muthia Umar, Farhan Ravenda Bannas

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

ravenda.farhan@gmail.com muthiaumar@yahoo.com

**Abstract**— This research is based on Broadcasting Act number 39 of 1999, on the right to obtain information. In addition, the Ministry of Information policy in 2017, requiring the use of sign interpreter in news programs on television. This policy received encouragement from deaf activists and the deaf organization GERKATIN. Television as a medium of information delivery to all walks of life, should be able to facilitate the needs of information without exception. Due to the diversity of thought, knowledge as well as the personality of deaf people, will give rise to a variety of receptions that appear after watching political news shows on television. The purpose of this study was to find out the reception of deaf people to the television broadcast of presidential election political news. Then to find out also the mortgage position of the deaf, which was put forward by deaf people after watching political news broadcasts on television. The methodology used in this study was qualitative with Stuart Hall's reception analysis. The results of this study show that the reception that arises from deaf people after watching political news is that watching political news on television does not affect political attitudes. However, with information literacy can strengthen the information that can be. The position of deaf reading in the news of the presidential election is not forever absolute, the double position is set against the backdrop of the environment and the thinking of the deaf.

**Keywords**— *Television, Political News, Deafness, Reception Analysis, Sign Language.*

**Abstrak**— Penelitian ini dilatarbelakangi oleh UU Penyiaran nomor 39 tahun 1999, tentang hak memperoleh informasi. Selain itu adanya kebijakan Menkominfo tahun 2017, mewajibkan penggunaan juru bahasa isyarat dalam program acara berita di televisi. Kebijakan ini mendapatkan dorongan dari para aktivis kaum tuli dan organisasi tuli GERKATIN. Televisi sebagai media penyampaian informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, sudah seharusnya dapat memfasilitasi kebutuhan informasi tanpa terkecuali. Akibat keberagaman pemikiran, pengetahuan juga kepribadian kaum tuli, akan menimbulkan beragam resepsi yang muncul setelah menonton tayangan berita politik di televisi. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui resepsi kaum tuli terhadap penayangan berita politik pemilihan presiden di televisi. Lalu untuk mengetahui juga posisi hipotekal dari kaum tuli, yang dikemukakan oleh kaum tuli setelah menonton tayangan berita politik di televisi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis resepsi Stuart Hall. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa resepsi yang muncul dari kaum tuli setelah menonton berita politik ialah menonton berita politik ditelevisi tidak mempengaruhi sikap politik. Akan tetapi, dengan literasi informasi dapat memperkuat informasi yang di dapat. Posisi pembacaan kaum tuli dalam tayangan

berita pemilihan presiden pun tidak selamanya mutlak, terjadinya *double position* dilatarbelakangi oleh lingkungan dan pemikiran yang dimiliki oleh kaum tuli.

**Kata Kunci**— *Televisi, Berita Politik, Kaum Tuli, Analisis Resepsi, Bahasa Isyarat.*

## I. PENDAHULUAN

Setiap individu dimuka bumi ini berhak mendapatkan informasi, hal apapun yang masyarakat perlukan. Dengan kecanggihan teknologi saat ini, masyarakat sangat mudah untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Salah satu media yang sering diakses oleh masyarakat adalah televisi, dimana media televisi menyajikan informasi berbentuk audio visual, yang sangat memudahkan masyarakat untuk memahami informasi. Di Indonesia hak untuk mendapatkan informasi tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran nomor 39 tahun 1999, yang berbunyi bahwa setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, berhak memperoleh informasi dengan menggunakan segala sarana yang tersedia, termasuk media televisi.

Siaran ditelevisi dianggap memiliki pengaruh besar dalam penyebaran informasi dibandingkan media massa lainnya, media yang bersifat audio visual dan sangat mudah ditemui di rumah ataupun di ruang publik. Salah satu informasi yang sering tayang ditelevisi adalah berita politik, dimana setiap harinya stasiun televisi akan menayangkan berita mengenai politik. Intensitas berita politik akan meningkat ketika pemilu, yang paling menjadi sorotan adalah pemilihan presiden.

Ketika pemilihan presiden, intensitas masyarakat dalam mencari informasi akan sangat meningkat, sebab akan mempengaruhi sikap politiknya. Berita politik penting bagi masyarakat, karena kebutuhan manusia terhadap berita merupakan naluri kesadaran. Selain itu masyarakat membutuhkan pengetahuan di luar pengalaman diri mereka yang memberikan rasa aman, membuat mereka bisa merencanakan dan mengatur hidup mereka.

Berita politik menjadi suatu hal yang sensitif, karena mengandung istilah-istilah yang tidak semua orang dapat memahami. Hal ini akan menimbulkan asumsi yang berbeda dimasyarakat, sesuai dengan pengetahuan masing-masing masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat dituntut untuk dapat mencerna sebaik mungkin, dalam menerima informasi dari berita politik ditelevisi. Karena kita tahu setiap stasiun televisi memiliki *framing* yang berbeda,

yang menjadikan kita harus pandai memilah informasi dari berita politik ditelevisi.

Sudah seyogyanya media televisi berperan sebagai penyambung informasi ke seluruh lapisan masyarakat, dengan tujuan khalayak dapat hidup secara merdeka. Lalu dapat mengatur diri sendiri sehingga terjadi perubahan pendapat, sikap dan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Pengaruh dari komunikasi massa tersebut dapat menimbulkan beragam pandangan. Penyimpulan pandangan terkadang dapat menjadi hukuman sosial bagi seseorang tanpa adanya peraturan sosial.

Walau bagaimanapun, kaum tuli memiliki hak dalam memperoleh akses informasi. Sesuai dengan UU Penyiaran nomor 39 tahun 1999, yang menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh informasi tanpa terkecuali. Oleh sebab itu seharusnya kaum tuli dan disabilitas lainnya, dapat terfasilitasi dalam memperoleh akses informasi khususnya mengenai politik pemilihan presiden.

Kebijakan dari Menkominfo tersebut, mendapatkan dukungan dari organisasi tuli Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) dan para aktivis tuli yang selalu berjuang menyuarakan hak-hak kawan tuli. Ini sebuah hasil para kaum tuli, dalam menyuarakan hak-haknya. Hal ini menunjukkan adanya rasa empati dari pemerintah terhadap para kaum disabilitas.

Dengan adanya penelitian ini, kita dapat mengetahui penerimaan kaum tuli terhadap pemberitaan politik di televisi, setelah berlakunya bahasa isyarat di setiap program berita. Berbagai aspek dapat kita ketahui dengan penelitian ini, selain mengetahui penerimaan kaum tuli terhadap pemberitaan politik, kita juga dapat mengetahui aspirasi mereka mengenai media massa saat ini bagi kaum tuli. Selain itu selaku mahasiswa ilmu komunikasi, dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan rasa empati kepada kaum disabilitas khususnya tuli, dalam segi komunikasi. Dengan itu media massa bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat yang disabilitas maupun yang non disabilitas. Selain itu dengan adanya kebijakan seperti ini, kaum tuli dapat melakukan literasi informasi, dimana mereka dapat ikut andil dalam mengawasi setiap media massa yang ada dan pemerataan informasi semakin meluas.

Bisa saja kebijakan menggunakan bahasa isyarat pada program acara berita ditelevisi, dapat mendorong kebijakan-kebijakan lainnya yang lebih pro kepada para kaum disabilitas. Dengan kata lain, kalimat memaanusiakan manusia bukan lagi sekedar slogan belaka, tetapi sudah benar-benar terealisasikan dilapangan. Walaupun pemilihan presiden sudah berlangsung tahun kemarin, tidak menjadikan penelitian ini tidak *up to date*, sebab pemilihan presiden akan berlangsung setiap lima tahun sekali.

Maka dari itu penelitian ini layak dilakukan, karena berita politik mengenai pemilihan presiden akan mempengaruhi pemimpin negara lima tahun kedepan. Dimana dalam penelitian ini menyangkut akan hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan yang terkandung dalam

sembilan elemen jurnalistik, dimana urutan sembilan berbunyi jurnalis harus mendengarkan hati nurani, pemilihan isu pun berdasarkan hati nurani penulis ingin mengangkat isu ini.

## II. LANDASAN TEORI

Dalam pengenalan ilmu komunikasi, komunikasi memiliki dua bentuk. Komunikasi verbal dan nonverbal. Secara inti, yang dimaksud dengan komunikasi verbal ialah komunikasi yang menggunakan kata-kata, entah secara lisan bahkan tulisan. Dan yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang menggunakan simbol, gambar, isyarat, atau gerakan. Komunikasi tidak segampang yang dibayangkan, dalam pertukarannya masih banyak yang mengalami 'salah kaprah' atau biasa disebut dengan *miss communication*.

Menurut Levine & Adelman (1993:xvii, dalam Mulyana 2012:5), *communication is the process of sharing meaning through verbal and nonverbal behavior* (komunikasi adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal dan nonverbal). Pada hakikatnya, segala bentuk pertukaran komunikasi diatas tidak lain untuk saling mempengaruhi, saling melengkapi, dan yang paling penting ialah saling membutuhkan. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, ia membutuhkan manusia lain.

Media massa pada saat ini memiliki banyak peran dalam kehidupan masyarakat. Media massa dijadikan sumber utama oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi-informasi yang berada di sekitar lingkungannya dan berada di dunia luar. Surat kabar menjadi produk media massa paling tua di Indonesia, disusul oleh radio, kemudian televisi, dan kini banyak pula media konvergensi yang menyebar informasi lewat internet, atau biasa disebut *online news*.

Selaras dengan yang dikemukakan oleh Dennis McQuail (1987), yaitu media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma – norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Di pihak lain, institusi media diatur oleh masyarakat.

Media massa merupakan sumber kekuatan –alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Media merupakan lokasi (atau normal) yang semakin berperan, untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

Media seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma – norma (Nurrudin, 2007:34)

Berita bertugas untuk menggambarkan suatu tragedi atau peristiwa yang dilaporkan dengan format tulisan

bahkan lisan sekalipun, tergantung kepada media penyebaran informasinya. Michael V. Charnley (dalam Sumadiria, 2005:64) menegaskan, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta dan opini yang menarik atau penting, atau kedua-duanya, bagi sejumlah besar penduduk. Maka dari itu, berita sangat berpengaruh dan sangat dibutuhkan bagi kelangsungan hidup masyarakat modern.

Keanehan dan keunikan dinilai dapat menjadikan berita semakin diminati, karena masyarakat membutuhkan berita yang menarik untuk dikonsumsi. Seperti yang dikatakan oleh Nothclife, "Jika seekor anjing menggigit orang, itu bukanlah berita. Tetapi ketika orang menggigit anjing, itulah berita" (*If a dog bites a man, it is not news. But if a man bites a dog is news*) (Romli, 2009:4).

Simbol atau Pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat juga dianggap sebagai sistem kode verbal. Bahasa dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol, dengan aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut, yang digunakan dan dipahami (Mulyana, 2007:256)

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kita tahu bahwa media televisi merupakan media *audio visual* dimana orang yang menontonnya akan dimanjakan dengan teknologi tersebut dan juga akan sangat mudah untuk memahami tayangan yang ada di televisi seperti berita. Kita tahu setiap masyarakat membutuhkan informasi untuk pengetahuan bagi dirinya pribadi, sama halnya dengan para kaum tuli mereka pun memiliki kebutuhan yang sama dengan masyarakat dengar pada umumnya. Hanya saja mereka membutuhkan fasilitas lebih yaitu penerjemah bahasa isyarat, karena mereka hanya menggunakan visualnya saja tidak menggunakan audio karena keterbatasan mereka.

Terkadang ketersediaan juru bahasa isyarat yang tidak selalu tersedia pada program berita, menjadikan kendala bagi para kaum tuli dalam menonton televisi. Mungkin akan sedikit terbantu dengan adanya *running teks* atau tulisan yang menjelaskan berita yang sedang tayang dan juga melihat visual yang ada di televisi. Tetapi hal itu semua tidak cukup untuk menerima isi dari berita yang diberikan. Penyebab dari penyediaan juru bahasa isyarat yang tidak setiap waktu akibat biaya produksi dari setiap program berbeda-beda

Media televisi menjadi sarana yang dijadikan pilihan utama dalam mencari informasi mengenai para calon presiden. Harapan dari penayangan berita pemilihan presiden di televisi, yaitu mempengaruhi sikap politik para penontonnya termasuk para kaum tuli. Oleh karena itu, pemberitaan pemilihan presiden dimuat seakan mempersuasi setiap penontonnya, agar memilih mereka ketika pencoblosan nanti. Tetapi pemberitaan pilpres di televisi tidak terlalu mempengaruhi sikap politik kaum tuli ketika sesudah menonton berita pemilihan presiden di televisi.

Kebijaksanaan tersebut selaras dengan fungsi media

massa yang disampaikan Mc. Quail (1994), bahwa media massa juga memiliki fungsi korelasi, yaitu sebuah fungsi media massa untuk menafsirkan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi berikut kemungkinannya hubungan dengan hal atau peristiwa lain yang terkait di masyarakat. Selain itu media massa juga memiliki fungsi sebagai interpreter, yaitu berfungsi sebagai penafsir atau penerjemah atas realitas yang sedang diamati atau terjadi di tengah masyarakat tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui apa saja yang perlu diperhatikan tanpa perlu melakukan proses interpretasi lebih lanjut.

Jika media tidak bisa *cover both sides*, informan memutuskan untuk dapat *cover both sides* dalam menanggapi berita pemilihan presiden di televisi. Dimana tanggapan-tanggapan tersebut menjadi pemikiran baru bagi informan, dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat hingga menyamakan berita hoaks.

Literasi informasi dilakukan kaum tuli dengan menggabungkan informasi yang didapat, ketika menonton berita pemilihan presiden di televisi dengan informasi yang didapat dari internet dan media lainnya. Meskipun mendapatkan informasi tambahan dari internet, mereka selalu berhati-hati agar tidak termakan berita hoaks. Selain alasan literasi media, mencari tambahan informasi dari media massa lain karena mereka merasa kurang paham ketika menonton berita pemilihan presiden di televisi. Hal itu disebabkan bahasa politik atau ukuran penerjemah yang terlalu kecil.

### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, hasil penelitian ini mengacu pada identifikasi masalah yang sudah disampaikan pada bab I. Penulis menghasilkan poin-poin penting penelitian mengenai resepsi kaum tuli terhadap tayangan berita pemilihan presiden di televisi juga mengenai posisi hipotekal pembacaan kode pesan informan dari wawancara mendalam tidak terstruktur. Berikut poin-poin kesimpulan yang penulis peroleh.

Bagi kaum tuli yang merupakan informan penelitian, televisi merupakan salah satu sumber informasi yang membantu untuk memenuhi kebutuhan informasi mengenai pemilihan presiden. Informan memiliki kendala dalam resepsi berita politik pemilihan presiden di televisi. Berita pemilihan presiden tidak mempengaruhi sikap politik para kaum tuli. Kaum tuli selalu mencari informasi tambahan mengenai pemilihan presiden dari media massa lain. Informan juga untuk meningkatkan pengetahuan literasi media dan 'melek' terhadap media.

Penulis menemukan jika posisi yang ditetapkan kepada informan ternyata tidak selamanya sebagai posisi yang mutlak. Di posisi dominan, informan menerima pesan berita pemilihan presiden secara keseluruhan, istilah-istilah politik yang muncul dapat diterima. Di posisi negosiasi, informan berperilaku secara netral dalam hal penerimaan pesan yang secara garis besar dapat diterima dan digabungkan dengan informasi dari media massa lain. Di dalam posisi oposisi, informan berperilaku menolak akibat

berbagai hal seperti ukuran penerjemah yang membuat informan sulit menerima pesan yang disampaikan, isu berita yang dimunculkan dan bahasa politik yang tidak semua dapat memahami.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mulyana, Deddy. 2012. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [2] Nurrudin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [3] Romli, Asep Syamsul. 2009. *Jurnalistik Praktis: Untuk Pemula, ed Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- [4] Sumadiria, Haris. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offs.